



Sultan Tak Masuk Prioritas Vaksin

TAHAPAN VAKSINASI COVID-19

Pemerintah merencanakan vaksinasi Covid-19 dilaksanakan mulai 14 Januari 2021 dengan menanti izin penggunaan darurat dari Badan Pengawas Obat dan Makanan. Tahap pertama vaksinasi diberikan bagi kelompok prioritas tenaga kesehatan dan petugas garda terdepan.



JOGJA-Gubernur DIY, Sri Sultan HB X belum masuk prioritas penerima vaksin tahap pertama di DIY. Pasalnya, persyaratan inklusi vaksinasi tetap harus terpenuhi, sedangkan Sri Sultan saat ini telah berusia di atas 60 tahun.

Lugas Subarkah, Abdul Hamid Razak, & David Kurniawan
redaksi@harianjogja.com

Kepala Dinas Kesehatan DIY, Pembujon Setyaningastutie, menjelaskan vaksinasi di DIY akan dimulai pada Kamis (14/1). Secara simbolis, vaksinasi dilakukan kepada sejumlah unsur pimpinan daerah dari Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda). Namun Gubernur DIY, Sri Sultan HB X belum masuk prioritas penerima vaksin tahap I. Vaksin dari Sinovac yang dipakai di Indonesia

Pemda DIY masih akan konsultasi dengan Pemerintah Pusat apakah Sultan bisa ikut vaksinasi atau tidak.

Bupati Gunungkidul Badingah tidak masuk dalam kriteria karena usianya sudah di atas ketentuan.

hanya diperuntukkan usia 18 tahun sampai dengan 59 tahun, sedangkan usia Sri Sultan saat ini di atas 60 tahun.

Pemda DIY masih akan konsultasi dengan Pemerintah Pusat apakah Sri Sultan bisa ikut vaksinasi atau tidak. Jika tidak mengikuti, Gubernur DIY akan tetap menyaksikan vaksinasi secara simbolis.

"Kemungkinan [pertama peroleh vaksin] Forkopimda, Sekda, Kepala Dinas Kesehatan, itu diminta pertama," kata

Pembujon kepada wartawan di kompleks Kantor Gubernur DIY, Selasa (5/1).

Setelah simbolis, kick off vaksinasi di DIY tahap pertama akan dimulai untuk seluruh tenaga kesehatan (nakes). Jumlah keseluruhan nakes di DIY saat ini masih terus berproses, karena selain nakes di rumah sakit dan puskesmas, Dinkes juga terus mendata nakes di klinik, praktik mandiri, bidan, dan lainnya.

Berdasarkan pendataan yang masih berproses itu, saat ini sudah tercatat lebih dari 30.000 nakes. Jumlah nakes ia akui lebih banyak dibandingkan jatah vaksin yang diberikan pada tahap pertama. Oleh karena itu jika tahap pertama ini belum memenuhi seluruh kebutuhan, Dinkes akan meminta lagi pada tahap berikutnya.



▶ Halaman 10

PENETAPAN SASARAN VAKSIN

Berdasarkan Kepmenkes 12757/2020

- Warga yang terdapat dalam Sistem Informasi Satu Data Vaksinasi Covid-19.
- Masyarakat kelompok prioritas sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- Dikecualikan bagi masyarakat yang tidak memenuhi kriteria penerima vaksin sesuai dengan indikasi vaksin.
- Pemberitahuan melalui short message service (SMS).
- Masyarakat yang mendapat SMS wajib mengikuti vaksinasi.



SMS VAKSINASI

- Kementerian Kesehatan mengirim SMS pemberitahuan kepada penerima vaksin yang terdaftar Tahap I (mulai 31 Desember 2020).
- SMS berisi informasi edukasi kepada calon penerima.
- Kemenkes mengirim SMS pendaftaran berupa tautan registrasi.
- Penerima SMS edukasi atau tenaga kesehatan dapat memeriksa status penerima vaksin di situs www.pedulilindungiug.

Grafis: Harian Jogja/Tris Hartono - Kumbhar Kartanegara

Sultan Tak...

Pembangun mengatakan Dinkes akan kembali menggelar pelatihan vaksinator pada 11 Januari selama tiga hari dengan metode daring dan on job training. Saat ini DIY baru memiliki sekitar 300 vaksinator yang telah dilatih. Bumi Mataram masih membutuhkan 1.013 vaksinator untuk memenuhi pelayanan sebanyak 2,6 juta vaksin.

Vaksinasi dilakukan di fasilitas layanan kesehatan (layankes) yang memenuhi kriteria. Sarana layankes yang harus terpenuhi yakni tempat mencuci tangan, memiliki rantai dingin, dan tersedia tenaga vaksinatornya.

"Vaksinasi itu tidak seperti biasa, harus ada jeda waktu 30 menit untuk melihat reaksinya," ungkapnya.

Pembelian menegakan 26.800 vaksin Covid-19 jenis Sinovac telah tiba di Gudang Farmasi Dinkes DIY pada Selasa pukul 06.19 WIB. Vaksin ini akan didistribusikan ke kabupaten-kota sebelum dimulai vaksinasi serentak pada 14 Januari.

Seluruh dosis vaksin dikemas dalam 14 boks dan diangkut menggunakan satu mobil boks. Pengiriman vaksin dikawal menggunakan mobil barakuda, E3 KBR dan dua mobil patwal.

Setelah kedatangan vaksin, Dinkes akan berkoordinasi dengan kabupaten/kota untuk memastikan teknis pendistribusian. "Instalasi penyimpanan mereka harus sudah siap. Kalau secara perencanaan mereka sudah siap," ujarnya.

Selain tempat penyimpanan, akan dikordinasikan pula teknis pengawasan, penjiagaan, sampai pada akhirnya ditetapkan vaksin boleh dibuka dan digunakan. Vaksinasi akan diawali Presiden RI dan seluruh Menteri yang memenuhi syarat pada 13 Desember, kemudian diikuti secara serentak oleh semua daerah pada 14 dan 15 Januari.

Bupati Gunungkidul

Tak hanya Sultan, Bupati Gunungkidul juga tidak masuk prioritas pemberian vaksin Covid-19 tahap pertama. Bupati Gunungkidul Badingah tidak masuk dalam kriteria karena usianya sudah di atas ketentuan.

Kepala Dinas Kesehatan Gunungkidul, Dewi Irawaty, mengatakan berdasarkan koordinasi dengan Pemerintah Pusat diputuskan proses vaksinasi akan dimulai 13 Januari untuk pejabat di Pemerintah Pusat, sedangkan untuk pejabat di daerah dilaksanakan 14-15 Januari mendatang.

"Selain bupati dan pejabat lainnya, saya juga termasuk yang pertama menerima vaksin di daerah," kata Dewi.

Meski ada instruksi pejabat di daerah untuk divaksin yang pertama, lanjut dia, Bupati Gunungkidul Badingah tidak masuk prioritas. Hal ini dikarenakan uji klinis vaksin Sinovac diperuntukkan bagi warga yang berusia 18 tahun-59 tahun, sedang bupati sudah berusia di atasnya. "Memang tidak masuk prioritas, tapi saat ada vaksin yang memiliki uji



Kabid Sumber Daya Kesehatan Dinas Kesehatan DIY, Trisno Agung (tengah) dan tim dari Bio Farma Cabang DIY, menerima vaksin di Gudang Farmasi Dinas Kesehatan DIY, Selasa (6/1).

klinis untuk orang di atas 60 tahun, maka akan ikut diberikan. Jadi, tinggal menunggu waktu saja," katanya.

Disinggung mengenai kesiapan menerima vaksin, Dewi mengaku tidak masalah karena vaksin tidak hanya diberikan kepada dirinya seorang. "Kami akan berikan advokasi ke masyarakat. Jadi saya siap disuntik, kan nanti banyak temannya juga," kata Dewi.

Selain menyasar pejabat di daerah, rencananya juga diberikan kepada tenaga kesehatan di Gunungkidul. Rencananya ada 3.396 tenaga kesehatan yang masuk database untuk divaksin.

"Memang nanti disaring lagi sesuai dengan kondisi kesehatan. Misal sudah pernah terpapar Corona, sedang hamil, ada komorbid, maka tidak akan divaksin karena tidak memenuhi persyaratan," katanya.

Bupati Gunungkidul Badingah mengatakan akan mengikuti aturan dalam prosedur pemberian vaksin. Ia berharap proses dapat berjalan dengan lancar. Meski demikian, Badingah mengingatkan pemberian vaksin hanya menjadi salah satu upaya pencegahan penularan virus sehingga langkah lain harus tetap dijalankan. Oleh karenanya, kebiasaan 3M yakni memakai masker, menjaga jarak, hingga mencuci tangan menggunakan sabun harus terus dijalankan.

"Mari bersama-sama melawan Corona dengan disiplin menjalankan protokol kesehatan," katanya.

Adapun, Dinkes Sleman masih menyiapkan rencana pelaksanaan vaksinasi Covid-19. Pasalnya ada perubahan jadwal pemberian vaksinasi dari rencana awal.

"Kami masih mematangkan pelaksanaannya. Rencana semula akan dilaksanakan 20 Januari, ini infoanya akan dimulai pada 14 Januari. Tapi masih koordinasikan dengan Provinsi," kata Kepala Dinkes Sleman Joko Hastaryo.

Alarm Darurat

Juru Bicara Satgas Covid-19 Wiku Adisasmito menyebut Indonesia dalam kondisi darurat setelah keterisian tempat tidur di ruang ICU dan ruang isolasi rumah sakit hampir penuh selama pandemi Covid-19.

Jumlah tempat tidur yang tersisa

di RS terus menipis karena kasus Covid-19 kian bertambah. Pekan ini, Satgas mencatat 67,61% tempat tidur ICU dan ruang isolasi di seluruh rumah sakit di Indonesia telah terisi.

"Ini dapat jadi alarm bagi kita bahwa kita sedang dalam keadaan darurat," kata Wiku dalam jumpa pers di Istana Kepresidenan, Jakarta, Selasa.

Wiku menyampaikan ada sembilan provinsi dengan tingkat keterisian tempat tidur di atas rata-rata nasional. DKI Jakarta menjadi yang tertinggi dengan tingkat keterisian 84,74%, disusul Banten (84,52%), DIY (83,36%), Jawa Barat (79,77%), Sulawesi Barat (79,31%), Jawa Timur (78,41%), Jawa Tengah (76,27%), Sulawesi Selatan (72,40%), dan Sulawesi Tengah (70,59%).

Wiku mengingatkan jumlah ketersediaan tempat tidur hanya salah satu faktor pendukung layanan kesehatan. Di saat yang sama, jumlah tenaga kesehatan juga terus berkurang karena terpapar Covid-19.

Wiku mengajak seluruh masyarakat untuk terus menegakkan protokol kesehatan secara disiplin. Ia bilang bukan tidak mungkin kondisi akan memburuk jika kasus terus bertambah. "Jika masyarakat terus abai, tidak akan cukup fasilitas kesehatan kita untuk menanganinya," ucap Wiku.

Adapun, Gugus Tugas penanganan Covid-19 DIY mengumumkan 297 penambahan kasus positif pada Selasa, berdasarkan pemeriksaan pada 1.106 sampel dari 1.078 orang Sleman mendominasi penambahan sebanyak 119 kasus, Kota Jogja (48 kasus), Bantul (88 kasus), Kulonprogo (11 kasus), dan Gunungkidul (31 kasus). Sebanyak 45 kasus dinyatakan sembuh dan tiga kasus dilaporkan meninggal.

Juru Bicara Pemda DIY untuk Penanganan Covid-19, Berry Murtiningsih, menjelaskan dilihat dari riwayatnya, penambahan kasus terdiri dari *mixing* kasus positif (159 kasus), periksa mandiri (81 kasus), *screening* karyawan kesehatan (satu kasus), dan belum ada keterangan (56 kasus).

Tiga kasus dilaporkan meninggal yakni Kasus 10.178, laki-laki, 18, warga Sleman; Kasus 12.404, laki-laki, 74, warga Kota Jogja; dan Kasus 12.955, perempuan, 49, Sleman. (Antara, Liputan6)

Instansi	Nilai Berita	Sifat	Tindak Lanjut
1. Dinas Kesehatan	Netral	Biasa	Untuk Diketahui

Yogyakarta, 17 September 2026
Kepala

Ig. Trihastono, S.Sos. MM
NIP. 19690723 199603 1 005